

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agustina, Rosa. (2019). *Hukum Perikatan*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Amin, Rahman. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atsar, Abdul; Rani Apriani. (2019). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Sleman: Deepublish
- Bakri, M. dkk. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia Pembidangan dan Asas-asas Hukum Jilid 2*. Malang: UB Press.
- Dirdjosisworo, Soedjono (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi.
- Djumialdji, (1996). *Hukum Bangunan: Ctk. Pertama*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fuady, Munir. (2015). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. (2014). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas, Marwan. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Mashudi, H. dan Moch. Chidir Ali. (2001). *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Cet.II*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Miru, Ahmadi dan Skka Pati. (2021). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Depok: Rajawali Pers.
- Miru, Ahmadi. (2017). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. (2015). *Hukum Acara Perdata Indonesi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2015). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Az. (2020). *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nugroho, Susanti Adi. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Safudin, Endrik. (2018). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing.
- Safudin, Endrik. (2018). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing.
- Shofie, Yusuf. (2000). *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- SMS, Salim (2008). *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2011). *Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Sofian, A. (2016). *Ajaran Kausalitas dalam R-KUHP*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suryono, Leli Joko. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: LP3M.
- Sutedi, Adrian. (2010). *Hukum Rumah Susun dan Apartemen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Zulham. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 309)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk Rumah Umum dan Satuan Rumah Susun Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 310)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

C. JURNAL

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. (2009). Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(2). 354-369 Doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16262>

Christiantoro, Tri Subagijo, *et. al.* (2023). Perlindungan Hukum Pembelian Rumah Susun Sistem Pre-Project Selling Melalui Perjanjian Pengikat Jual Beli yang dibuat oleh Notaris. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(3), 907-916.

- Dewi, Ni Made Trisna. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81-89. Doi: <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>
- Halim, Arivan. (2022). Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat Pengembang Dalam Pre-Project Selling. *Jurnal Justice Voice*, 1(2), 53-69. Doi: <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.192>
- Kerti, N.G.N. Renti Maharaini. (2021). Menguntungkan Atau Merugikan: Pemasaran Secara Pre-Project Selling Sektor Hunian Vertikal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 4(1), 18-23. Doi: <https://doi.org/10.25105/hpph.v4i1.12900>
- Purbandari. (2012). *Kepastian dan Perlindungan Hukum Pada Pemasaran Properti Dengan Sistem Pre Project Selling*. *Jurnal Ilmiah Widya*, 29(320), 12-18.
- Putra, Johan's Kadir; Rada Alfathania.H. (2020). Asas Kebangsaan Dalam Perjanjian Nominee Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(2), 328-335.
- Rahmat, Panca Basuki, *et. al.* (2022). Akibat Hukum Jual Beli Apartemen Sistem Pre-Project Selling Yang Tidak Dibuat Dalam Akta Notaris. *Jurnal Suara Hukum*, 4(2), 379-407. Doi: <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p379-407>
- Saraswita, Diah Ayu. (2019). Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Praktik Pre-Project Selling. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 5(2), 223-229. Doi: <http://ejournal-pps.unsuri.id/index.php/jmhp/article/view/89>

- Setiawati, Anda. (2019). Upaya Hukum Terkait Masalah Penjualan Rumah Susun Yang Diikat Dengan PPJB. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2), 1-9. Doi: <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5482>
- Siddhi, I. G. N. B. P., & Purwanto, I. W. N. (2024). Upaya Hukum Developer dalam Pemberian Somasi Kepada Konsumen Terkait Dengan Pembatalan Pemesanan Properti. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(4), 132-141. Doi: <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i4.2383>
- Sinaga, Niru Anita; Nurlaly Darwis. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2), 43-57.
- Sitorus, Syahrul. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet). *Jurnal Hikmah*, 15(1), 63-71.
- Widiarty, W. S. (2015). Gugatan Class Action Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal to-ra*, 1(2), 89-98. Doi: <https://doi.org/10.33541/tora.v1i2.1135>
- Yudhantaka, Lintang. (2017). Keabsahan Kontrak Jual Beli Rumah Susun dengan Sistem Pre Project Selling. *Jurnal Yuridika*, 32(1), 84-104. Doi: <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4793>

D. SKRIPSI, TESIS dan DISERTASI

- Fardilla, Denisa Ratna. Tesis. (2019). *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Kota Makassar)*. Makasar: Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia.

Selly. (2021). Skripsi. *Analisis Yuridis Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas Sistem Pre Project Selling*. Fakultas Hukum Universitas Putera Batam.

Suraja, Clara Julitha. (2018). Skripsi. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pemasaran Apartemen Meikarta Dengan Sistem Pre-Project Selling Yang Belum Memiliki Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

E. LAIN-LAIN

Apa Arti Dari Meikarta? Berikut Ini Penjelasan Mengenai Arti Meikarta, diakses pada <https://mei-karta.com/blog/arti-nama-meikarta/> , pada tanggal 07 Maret 2024, pukul 0:59.

Kota Meikarta, Deddy Mizwar: Masak Saya Harus Kirim Satpol PP, diakses dari <https://metro.tempo.co/read/896302/kota-meikarta-deddy-mizwar-masak-saya-harus-kirim-satpol-pp> , pada tanggal 06 Maret 2024, pukul 16.00 WIB.

Kronologi Kasus Meikarta, Dulu Jor-Joran, Kini Lepas Tangan, Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230220113434-17-415229/kronologi-kasus-meikarta-dulu-jor-joran-kini-lepas-tangan> , pada tanggal 06 Maret 2024, pukul 15.09 WIB.

Lippo's Meikarta Secures 32.000 Fixed Buyers, diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2017/09/12/lippos-meikarta-secures-32000-fixed-buyers.html> , pada tanggal 06 Maret 2024, pukul 16.20 WIB.

Letezia Tobing. (2012). Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis.

Dikutip dari website Hukum Online, diakses pada

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/lex-spesialis-dan-lex-generalis->

[lt509fb7e13bd25/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/lex-spesialis-dan-lex-generalis-lt509fb7e13bd25/). Pada tanggal 28 Agustus 2024, Pukul 15.53. WIB.

Wulandari, Siti, *et. al.* (2021). Restrukturisasi Kontrak Untuk Mewujudkan

Keadilan Dalam Bisnis. *In Proceeding of Conference on Law and Social*

Studies, Universitas PGRI Madiun.